RENJA

2022

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, Dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2022 dapat ditetapkan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja SKPD Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Blitar, September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BLITAR

Drs. MUHANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620815 199303 1005

Dipindai dengan CamScanner

RENJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Terhadap RKPD 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 31

3.3 Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB V PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2021 Kabupaten Blitar 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 19

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2022:

a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
d. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
e. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
g. Undang – Undang Nomor15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
h. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
i. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
j. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PertanggungJawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
q. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun 2022 disusun dengan maksud untuk mensinergikan program nasional, regional dan sektoral yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 atau sumber dana lainnya;
b. Peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;
c. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program SKPD meliputi perencanaan, pelaksaan dan evaluasi program yang terimplementasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja P SKPD, proses penyusunan Renja P SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja P SKPD

1.4. SistematikaPenulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya diakitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayaan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, mislanya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari

SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar mempunyai tugas dalam pencapaian Tujuan dari Misi ke-4 RPJMD : ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan*** dengan indikator tujuan : Gini Rasio, Indek Kepuasan layanan Infrastruktur, dan *Pertumbuhan ekonomi.* Guna mendukung pencapaian misi tersebut, maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dituangkan pada Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana tujuan dan sasaran jangka menegah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan pada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2021, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun 2021 melaksanakan 16 program, dan dijabarkan ke dalam 33 kegiatan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Blitar

Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100%**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100%**	-
	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100%**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100%**	-
				Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**28 Orang**	**28 Orang**	**28 Orang**	**28 Orang**	**100 %**	**28 Orang**	**28 Orang**	**100%**	-
				Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	100%	28 Orang	28 Orang	100%	-

-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	100%	28 Orang	28 Orang	100%	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	-
	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	-
	Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	18000 Eksemplar	20000 Eksemplar	20000 Eksemplar	22000 Eksemplar	100%	25000 Eksemplar	30000 Eksemplar	100%	-
				Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Kali	300 Kali	340 Kali	380 Kali	100%	420 Kali	450 Kali	100%	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9 Jemis**	**9 Jemis**	**10 Jemis**	**10 Jemis**	**100%**	**10 Jemis**	**10 Jemis**	**100%**	-
				Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	2 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	100%	-
				Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	8 Unit	6 Unit	100%	8 Unit	6 Unit	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	-
				kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-
				kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-
				Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	-
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Jenis Dokumen RTKD yang di susun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100%	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100%	-
				Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenagakerja.	NA	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	-
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Lulusan bersertifikat Pelatihan**	**NA**	**70%**	**75%**	**80%**	**100%**	**85%**	**90%**	**100%**	-
				Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	15 Orang	80 Orang	85 Orang	90 Orang	100%	90 Orang	90 Orang	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan**	**NA**	**30 LPKS**	**32 LPKS**	**34 LPKS**	**100%**	**36 LPKS**	**36 LPKS**	**100%**	
				Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang Dibina	NA	30 LPKS	32 LPKS	34 LPKS	100%	36 LPKS	36 LPKS	100%	
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan**	**NA**	**1700 Orang**	**1870 Orang**	**2057 Orang**	**100%**	**2263 Orang**	**2482 Orang**	**100%**	
				Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani	NA	2000 Loker	2200 Loker	2420 Loker	100%	2662 Loker	2920 Loker	100%	
				Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	NA	300 Orang	310 Orang	320 Orang	100%	330 Orang	340 Orang	100%	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja**	**NA**	**12 Buku**	**12 Buku**	**12 Buku**	**100%**	**12 Buku**	**12 Buku**	**100%**	
				Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penempatan tenagakerja melalui InformasiPasar Kerja (IPK) Online(SISNAKER)	NA	1000 Orang	1100 Orang	1210 Orang	100%	1331 Orang	1460 Orang	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang melalui pameran bursa kerja	NA	390 Orang	450 Orang	517 Orang	100%	592 Orang	672 Orang	100%	-
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Ditempatkan**	**NA**	**3000 Orang**	**3250 Orang**	**3500 Orang**	**100%**	**3750 Orang**	**4000 Orang**	**100%**	-
				Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Kasus yang difasilitasi	NA	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	100%	60 Kasus	60 Kasus	100%	-
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Dilayani	NA	3500 Orang	3750 Orang	4000 Orang	100%	4250 Orang	4500 Orang	100%	-
				Kegiatan : Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang mendapat pelatihan kewirausahaan	NA	150 Orang	150 Orang	160 Orang	100%	170 Orang	180 Orang	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	**10 Perusahaan**	**30 Perusahaan**	**50 Perusahaan**	**70 Perusahaan**	**100%**	**90 Perusahaan**	**110 Perusahaan**	**100%**	-
				Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan	NA	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	-
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Survey KHL dan Sidang Dewan Pengupahan	NA	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	NA	100%	-
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**NA**	**5 Kasus HI**	**10 Kasus HI**	**10 Kasus HI**	**100%**	**12 Kasus HI**	**15 Kasus HI**	**100%**	-
				Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Angka sengketapengusaha-pekerja pertahun	NA	5 Sengketa	10 Sengketa	10 Sengketa	100%	12 Sengketa	15 Sengketa	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit kabupaten/kotayang diberdayakan	NA	1 LKS	1 LKS	1 LKS	100%	1 LKS	1 LKS	100%	-
				Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapat Jaminan Sosial tenaga Kerja	NA	100 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	175 Orang	200 Orang	100%	-
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dam anggota	NA	30 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100%	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100%	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022		Catatan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capai an Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi										
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Dilatih dan Diberangkatkan**	**20 Orang**	**20 Orang**	**20 Orang**	**20 Orang**	**100%**	**20 Orang**	**20 Orang**	**100%**	-
				Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana	3 KSAD	3 KSAD	3 KSAD	3 KSAD	100 %	3 KSAD	3 KSAD	100%	-
				Kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penempatan Transmigran	10 Orang	10 Orang	11 Orang	12 Orang	100%	13 Orang	14 Orang	100%	-

Berdasarkan data pada tabel 2.1. dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja masing-masing kegiatan dan program pada tahun 2022 pada umumnya sudah memenuhi target, bahkan ada yang melebihi dari target renja maupun renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar cukup bagus.

Namun ada program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang belum memenuhi target kinerja sehingga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan kedepan, yaitu program transmigrasi regional dengan realisasi target kinerja sebesar 33,33 persen. Hal ini terjadi karena turunnya jumlah kuota transmigran yang diberangkatkan dari target yang diberangkatkan 9 KK menjadi 3 KK. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program pada tahun mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada akhir tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, terjadi perubahan nomenklatur yang semula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Namun demikian, urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja tetap seperti sebelumnya, yaitu urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan dasar, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2022-2026.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator SPM/ standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah selama tahun 2021 dapat dilihat pada table 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/standar nas	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*1*	*11*	*1*	*1*	*1*
	Indikator Kinerja Utama PERANGKAT DAERAH												
1.	Indeks Kepuasan Aparatur			baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
2.	Score SAKIP SKPD			BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	BB	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			71,53 %	72,51 %	72,96 %	73,58 %	74,16 %	70,83 %	70,93 %	71,53 %	72,51 %	
4.	Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel 2.2. dapat dilihat ada beberapa indikator kinerja baik IKU, SPM dan IKK yang telah memenuhi target, namun ada juga beberapa indikato kinerja yang belum memenuhi target. Ketercapaian masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Aparatur

   Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah Baik Hal ini bisa tercapai karena semua kegiatan administrasi perkantoran dan juga pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun anggaran 2021.

2. Score SAKIP SKPD

   Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah BB, Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja tahun-tahun yang akan datang. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan SKPD. penyusunan dokumen yang tepat waktu sesuai jadwal agar indicator score SAKIP SKPD naik di tahun mendatang, hal ini tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh elemen yang ada pada PERANGKAT DAERAH, sehingga dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan dapat tersusun sesuai dengan ketentuan.

3. Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

   Pada tahun 2021 indikator kinerja ini terealisasi 70,93%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 68,81%, atau mendapat capaian 104%. IKU ini didukung oleh 5 program dengan 9 kegiatan, Yaitu :

   a. Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
      1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ;
   b. Program Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ;
      1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   c. Program Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pelayanan antar Kerja
      2) Perluasan Kesempatan Kerja

d. Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   2) Job Fair/Bursa Kerja
e. Program Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
   1) Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
   2) Penyedia Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
   3) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

4. Prosentase kasus hubungan industrial (HI) yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

   Sesuai dengan target yang ditetapkan Pada tahun 2021, ada 23 kasus HI yang dilaporkan, dapat diselesaikan melalui LKS Bipartit sebanyak 21 dan 2 masih dalam proses. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar cukup efektif untuk mengendalikan terjadinya kasus HI. Namun demikian diharapkan tahun-tahun berikutnya, kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti bisa berkurang lagi.

DATA SENGKETA PENGUSAHA – PEKERJA YANG DILAPORKAN DAN DISELESAIKAN JANUARI-AGUSTUS 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS PERSELISIHAN (KASUS)	PENYELESAIAN PERSELISIHAN (KASUS)								JUMLAH
			DI LUAR PENGADILAN					DI PENGADILAN	PROSES		
			BIPARTIT	MEDIASI	KONSILIASI	ARBITRASI	JUMLAH		DALAM PROSES	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Blitar	Hak	16	0	0	0	16	0	0	16	16
		Kepentingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PHK	9	0	0	0	9	0	2	7	9
		Antar SP/SB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			**23**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar Tahun 2020

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses pembangunan

sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak.

Gambaran Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

Dari grafik di atas dapat dilihat, jumlah pencari kerja terdaftar mengalami penurunan mulai tahu 2019 sampai dengan tahun 2021. Di sisi lain, jumlah lowongan yang ada dan yang terpenuhi masih jauh dari jumlah pencari kerja yanga ada. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan diantaranya penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Dari segi pengupahan, UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) di Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari UMK Kabupaten Blitar tahun 2020 sebesar Rp 1.954.705 menjadi Rp 2.004.705 di tahun 2021. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah prosentase perusahaan yang menerapkan UMK juga masih rendah. Hal ini terjadi karena jumlah terbesar perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar adalah perusahaan kecil dan menengah, dengan pekerja tetap terbatas, sehingga hanya sedikit perusahaan yang bisa menerapkan UMK.

Selain urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan urusan pilihan transmigrasi. Adapun tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam

melaksanakan urusan transmigrasi meliputi fasilitasi pendaftaran, seleksi calon transmigran, pelatihan bagi calon transmigran yang telah terseleksi, dan fasilitasi pemberangkatan sampai di daerah tujuan. Untuk mengetahui perkembangan jumlah transmigran yang mendaftar dan diberangkatkan dapat dilhat pada bagan berikut ini.

Jumlah Pendaftar Transmigran, Kerjasama dengan Daerah Transmigrasi, dan Transmigran Diberangkatkan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah yang mendaftar	KK	57	51	42	14	16
2	Kerjasama dengan daerah transmigrasi	Paket	1	1	3	0	1
3	Jumlah yang diberangkatkan	KK	2	1	10	0	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

Dengan melihat perkembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Blitar selama periode lima tahun terakhir, maka dapat disimpulkan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Jumlah angkatan kerja cukup banyak, namun kompetensi dan daya saingnya masih rendah. Sehingga kurang diminati dalam pasar kerja.
2. Jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja tidak seimbang, sehingga tingkat kesempatan kerja masih rendah.
3. Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/ buruh;
4. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan hak-hak jaminan sosial bagi tenaga kerjanya.
5. Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga.

Isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor- faktor baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kekuatan, kelemahan, bahkan bisa juga menjadi peluang dan tantangan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. **Kekuatan (Strenght)**
   - Adanya sumber daya aparatur dan dukungan sarana prasarana
   - Adanya regulasi tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi
   - Adanya dukungan anggaran
2. **Kelemahan (Weaknes)**
   - Tenaga fungsional/teknis terbatas
   - Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum optimal;
   - Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja
   - Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta
3. **Peluang (Opportunity)**
   - Jumlah angkatan kerja cukuk banyak
   - MEA membuka kesempatan kerja cukup luas baik dalam maupun luar negeri
   - Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi
4. **Tantangan (Treath)**
   - Kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah
   - Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/ buruh
   - Masih rendahnya tingkat kemandirian calon transmigran

Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka dapat dilakukan penyusunan strategi dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

1. **Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (S-O)**

   Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsiny masing-masing.

2. **Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. (W-O)**

   Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.

3. **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja dan pelatihan produktivitas (S-T)**

   Strategi ini dilakukan dengan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja (berbasis kometensi, masyarakat dan kewirausahaan), serta pelatihan produktivitas bagi tenaga kerja.

4. **Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja (W-O)**

   Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta dalam hal penyediaan informasi pasar kerja, serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Program kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung strategi ini diantaranya pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), peningkatan kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus, maupun optimalisasi bursa kerja online (BKOL).

5. **Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan (S-T)**

   Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran perusahaan/pemberi kerja untuk menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Salah satu diantaranya adalah masih rendahnya komitmen perusahaan untuk menerapkan UMK bagi pekerjanya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap perusahaan serta melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha untuk berperan aktif dalam pengusulan UMK melalui sidang dewan pengupahan.

6. **Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan (W-T)**

   Animo masyarakat di Kabupaten Blitar untuk mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian calon

transmigran adalah melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kondisi daerah tujuan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, telaah prioritas RPJMN 2020-2024, analisis isu-isu kebijakan nasional, arah

Penyusunan RKPD 2022 seiiring dengan penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan Rancangan RPJMD maka kedua dokumen tersebut focus tahun 2022 adalah" **Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**"

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan Renstra Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja mengajukan 7 program rutin, 4 program prioritas dan 2 program pendukung IKU Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar melaksanakan pelatihan aneka kue, Barbershop, dan Tata boga dengan dengan dana yang bersumber dari dana DBHCHT melibatkan peserta sejumlah 120 orang peserta. Pada tahun 2021, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menginginkan adanya pelatihan lanjutan, serta mengharapkan adanya bantuan peralatan. Hal ini menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Akan tetapi untuk bantuan peralatan masih belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021, karena ada peraturan perundangan yang harus menjadi pedoman pelaksanaan mengenai hibah dan bansos.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan strategi pembangunan nasional, norma pokok pembangunan kabinet kerja yang harus diperhatikan :

a. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait ;
b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah *(entitled society)* ;
c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar ;
d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem ;
e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

Analisis yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pemerintah pusat:

1. Pemerintah Daerah harus mengusung Program Prioritas Nasional untuk masuk kedalam RPJM Daerah (mekanisme sinkronisasi ditetapkan oleh pemerintah pusat);
2. Menggunakan pendekatan Perencanaan Terintegrasi terhadap Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Berorientasi pada "*money follow program"* daripada *"money follow functions"* artinya review atas Kapasitas Kelembagaan menjadi penting;
4. Nomeklatur Program hanya sebagai 'rumah' dan dokumen penganggaran (karena melekat kode rekening anggaran), yang terpenting adalah definisi dari program tersebut dan kegiatan prioritas di dalam program tersebut;
5. Pembahasan RKP 2022 dimulai n-2 dengan mekanisme pembahasan masing-masing tematik prioritas nasional.

Dalam rangka penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2022 perlu ditinjau perspektif dan sudut pandang pembangunan nasional terhadap Kabupaten Blitar. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan

strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa:

1. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dan strategi peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyediaan sistem pemantauan gunung merapi.
2. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Jawa-Bali Periode 2020-2024, dimana Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (II/C/2)

Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terhadap keberadaan Kabupaten Blitar didasarkan pada karakteristik sekaligus potensi yang dapat dikembangkan Kabupaten Blitar dalam rangka sebuah sistem pembangunan nasional. Selain arah kebijakan dan strategi nasional, perlu ditelaah penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2022 dalam cakupan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam Hal Penyelarasan RKP Dengan RKPD Provinsi Jawa Timur yang merupakan pemulihjan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil Pembangunan.

Dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, maka program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2022, diupayakan semaksimal mungkin bisa mendukung tercapainya kebijakan tersebut, dan juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dan provinsi, serta berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2021-2026,

strategis rencana kerja SKPD Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Blitar merupakan Tujuan dari Misi ke-4 RPJMD : ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan*** dengan indikator tujuan : Gini Rasio, Indek Kepuasan layanan Infrastruktur, dan *Pertumbuhan ekonomi.* dengan Sasaran Pembangunan:

a. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarkat;
b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan ;
c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah .

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja SKPD tahun 2022 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD sebagai berikut :

a. Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja dengan Indikator Sasaran Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja
b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja kerja dengan Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
c. Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dengan indikator sasaran Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melaui perjanjian bersama (PB)

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2022 serta program kegiatan yang telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2022-2026, maka pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja menyusun program kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Nama SKPD : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Bidang : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kepuasan aparatur**		**95%**		**APBD**		**100%**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan**	**Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar**		**154.110.000**	**APBD**		**4 jenis**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun		4 Dokumen	40.000.000	APBD		4	40.000.000
	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	114.110.000	APBD		2	125.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	Disnaker Kab. Blitar		**49.670.000**	**APBD**		**6 Dokumen**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1				**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Blitar	2 Dokumen	14.670.000	APBD		2 Dokumen	75,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnaker Kab. Blitar	4 dokumen	35,000,000	APBD		4 dokumen	35,000,000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Disnaker Kab. Blitar		**20.000.000**	APBD		**30 Orang**	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Blitar	28	20.000.000	APBD			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel**	**Disnaker Kab. Blitar**		**312.781.820**	**APBD**		**12 Bulan**	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Blitar	12 Bulan	67.781,820	APBD		3	67,781,820
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Disnaker Kab. Blitar	4 Jenis	45.000.000	APBD		4	45,000,000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Disnaker Kab. Blitar	18.000 Eksemplar	50.000.000	APBD		20,000	50,000,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Kab. Blitar	240	150.000.000	APBD		300	150,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1				**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disnaker Kab. Blitar**		**150.000.000**	**APBD**		**9**	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Disnaker Kab. Blitar	4 Unit	25.000.000	APBD		4	25,000,000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Disnaker Kab. Blitar	5 Jenis	125.000.000	APBD		5	125,000,000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnaker Kab. Blitar**		**309.110.000**	**APBD**		**12 Bulan**	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Blitar	12 Bulan	110.000.000	APBD		12 Bulan	110,000,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Blitar	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Umum Kantor	Disnaker Kab. Blitar	12 Bulan	149.110.000	APBD		12 Bulan	160,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnaker Kab. Blitar**		**310.000.000**	**APBD**		**12 Bulan**	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker Kab. Blitar	12 Bulan	125.000.000	APBD		12 Bulan	125,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1				**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Disnaker Kab. Blitar	3 Jenis	185.000.000	APBD		3 Jenis	175,000,000
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja**	**Disnaker Kab. Blitar**	**30 %**		**APBD**		**40%**	
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Jenis Dokumen RTKD yang disusun**	**Disnaker Kab. Blitar**		**90.000.000**	**APBD**		**1**	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Disnaker Kab. Blitar	1	40.000.000	APBD		1	40,000,000
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	Disnaker Kab. Blitar	10	50.000.000	APBD		10	60,000,000
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi**	Bid. LattasTrans	0,02		APBD		**0.02**	
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Lulusan bersertifikat Pelatihan**	**Bid. LattasTrans**		**495.510.000**	**APBD**		**70 Orang**	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	Bid. LattasTrans	80 Orang	495.510.000	APBD		80 Orang	660,000,000
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan**	**Bid. LattasTrans**		**154.110.000**	**APBD**		**30 LPKS**	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang Dibina	Bid. LattasTrans	30 Orang	154.110.000	APBD		30 LPKS	165,000,000
				Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	Bid. LattasTrans		65.000.000	APBD		20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerima konsultasi peningkatan produktivitas	Bid. LattasTrans	20 Orang	65.000.000	APBD		20	65,000,000
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Produktivitas Daerah Kabupaten/Kota**	**Bid. LattasTrans**		**70.989.534**	**APBD**			
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bid. LattasTrans	1 Kali	70.989.534	APBD		1	70,989,534
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan**	**Bid. Penta & PKK**	**84 %**				**85 %**	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan**	**Bid. Penta & PKK**		**1.866.571.749**			**1700 Orang**	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Bid. Penta & PKK	8 Orang	153.600.000			8 Orang	153,600,000
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani	Bid. Penta & PKK	1.200 Orang	232.971.749			2.000 Orang	247,455,749
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti PBJ	Bid. Penta & PKK	40 Orang	50.000.000			40 Orang	50,000,000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah pelaksanaan pelatihan disabilitas	Bid. Penta & PKK	10 Orang	20.000.000			10 Orang	20,000,000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Bid. Penta & PKK	300 Orang	1.410.000.000			300 Orang	600,000,000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja**	**Bid. Penta & PKK**		**190.000.000**			**12 Buku**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Bid. Penta & PKK	800	70.000.000			1.000 Orang	70,000,000
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan melalui Job Fair	Bid. Penta & PKK	120	120.000.000			390 Orang	120,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Ditempatkan**	**Bid. Penta & PKK**		**710.000.000**			**3.000 Orang**	
	Peningkatan pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Kasus yang difasilitasi	Bid. Penta & PKK		285.000.000				285,000,000
	Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Dilayani	Bid. Penta & PKK	2100 Orang	25.000.000			3500 Orang	25,000,000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Bid. Penta & PKK	150 Orang	400.000.000			150 Orang	250,000,000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	Bid. Hubin syaker	25 %				**30%**	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	Bid. Hubin syaker		174.110.000			**30**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan	Bid. Hubin syaker	30	30.000.000			20	12,180,000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Bid. Hubin syaker		144.110.000				74,064,000
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	Bid. Hubin syaker		215.891.713			**5**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1				**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Bid. Hubin syaker		102.741.500			5	179,938,713
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Data HI	Bid. Hubin syaker		43.000.113			136	11,327,000
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Bid. Hubin syaker		43.600.100			1	19,992,000
				Pengembangan Pelaksananan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapat Jaminan Sosial tenaga Kerja	Bid. Hubin syaker	100 Orang	26.550.000			100	10,000,000
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Transmigrasn Yang Ditempatkan**	Bid. LattasTrans	**50 %**				**50%**	
				Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Dilatih dan Diberangkatkan**	Bid. LattasTrans		171.565.625			**20 Orang**	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana	Bid. LattasTrans	3	100.425.000			3 KSAD	70,000,000
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penempatan Transmigran	Bid. LattasTrans	10 KK	71.140.625			10 Orang	50,640,625

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada RENSTRA Perangkat Daerah serta mendukung program prioritas daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2022-2026, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mengusulkan 16 program yang terbagi menjadi 33 kegiatan. Dari 16 program tersebut, yang masuk dalam program prioritas daerah adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,program peningkatan kesempatan kerja, program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana disajikan pada bab 3.

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang tersedia. Apabila PAGU anggaran yang diperoleh SKPD tidak bisa mencukupi untuk mengakomodir semua usulan, maka SKPD akan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai program pendukung pencapaian visi misi kepala daerah, dan juga mendukung program pemerintah provinsi maupun program nasional. Selain dari APBD, SKPD bisa mengajukan usulan program kegiatan yang bisa didanai dari provinsi maupun anggaran dari pusat, sepanjang program kegiatan dimaksud masih linear dan bertujuan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V
PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menjadi salah satu SKPD yang mendapat tugas dalam Tujuan: "**Peningkatan kesempatan kerja dan Daya Beli Masyarakat**" dengan indikator tujuan *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RENSTRA SKPD serta mendukung program prioritas daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mengusulkan 6 program yang terbagi menjadi 16 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Dari 6 program tersebut, yang masuk dalam program prioritas daerah adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Dengan melihat hasil capaian kinerja masing-masing program pada tahun 2020, serta pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 sampai dengan tribulan I, maka perlu dilakukan strategi-strategi guna mempertahankan dan meningkatkan realisasi capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Strategi yang bisa dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas manajemen organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pelatihan peningkatan keterampilan kerja dan poduktivitas tenaga kerja, serta pembinaan terhadap LPKS yang ada agar mampu mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi.
3. Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja serta pengembangan wirausaha baru dalam rangka perluasan kesempatan kerja;

4. Peningkatan pembinaan terhadap perusahaan selaku pemberi kerja serta pembinaan terhadap pekerja tentang peraturan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja;
5. Peningkatan keterampilan calon transmigran melalui pelatihan sesuai dengan kondisi daerah tujuan dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran.

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang tersedia. Apabila PAGU anggaran yang diperoleh SKPD tidak bisa mencukupi untuk mengakomodir semua usulan, maka SKPD akan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai program pendukung pencapaian visi misi kepala daerah, dan juga mendukung program pemerintah provinsi maupun program nasional. Selain dari APBD, SKPD bisa mengajukan usulan program kegiatan yang bisa didanai dari provinsi maupun anggaran dari pusat, sepanjang program kegiatan dimaksud masih linear dan bertujuan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diusulkan dibagi ke bidang-bidang sesuai tugas dan fungsinya. Dengan menyusun penetapan kinerja pada awal tahun anggaran, diharapkan pelaksana program kegiatan bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program kegiatan, diharapkan ada koordinasi yang baik di lingkup internal SKPD, maupun koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, sehingga program kegiatan tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan target kinerja dapat tercapai dengan maksimal.